

# Implementasi Keanggotaan Jepang Dalam International Whaling Commission (IWC) Terkait Kebijakan Scientific Whaling

Barry Dieo Airlangga– 071012104

*Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga*

## ABSTRACT

*Jepang menjadi negara dengan sejarah panjang dalam perburuan ikan paus, namun aktivitas perburuan ikan paus Jepang mengalami proses yang sulit ketika IWC menyetujui moratorium berisi zero commercial whaling. Scientific whaling menjadi respon Jepang terhadap moratorium. Melalui kerangka berpikir Japanese System dan Structural Paternalistic model, penelitian ini akan menjelaskan alasan Jepang mempertahankan keanggotaannya di IWC. Dengan menggunakan studi pustaka dan analisis data, kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian eksplanatif ini mendukung hipotesis bahwa Jepang memperjuangkan dan mendapatkan special permit berupa scientific whaling dalam keanggotaannya di IWC karena berhasil memanfaatkan penelitian dan budaya sebagai kamufase Jepang dalam mempertahankan kepentingan whaling triangle.*

**Kata Kunci:** *Alasan Jepang, Whaling, International Whaling Commission (IWC), Keanggotaan Jepang, Whaling Triangle, Kamufase Budaya, Special Permits.*

*Japan is a country with a long history of whaling, but Japan's whaling activities experienced a difficult process when the IWC approved a moratorium on commercial whaling contains zero. Scientific whaling Japan's response to the moratorium. Through the frame of Japanese System and Structural Paternalistic models, this study will explain the reason for the Japanese maintain their membership in the IWC. By using a literature review and analysis of data, conclusions obtained in this study support the hypothesis that explanative Japanese fight and get a special scientific permit whaling in its membership in the IWC because it managed to take advantage of research and culture as camouflage Japanese whaling interests in maintaining triangle.*

**Keywords:** *Japan Reason, Whaling, the International Whaling Commission (IWC), Membership of Japan, Whaling Triangle, Camouflage Culture, Special Permits.*

Tingginya tingkat kematian paus menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini dan menghasilkan respon yang cukup tinggi dari masyarakat dunia, sehingga International Whaling Commission (IWC) menjadi salah satu badan regulasi yang muncul sebagai respon dari masyarakat dunia dalam menanggulangi dan mengatur regulasi *whaling*. IWC berada dibawah Convention for the Regulation of Whaling (ICRW) yang dibentuk pada tahun 1931. Semua Negara dapat berpartisipasi kedalam IWC dengan syarat negara yang ingin bergabung harus menandatangani perjanjian ICRW.

Tugas utama dari IWC adalah untuk melakukan tinjauan dan merevisi seperlunya langkah-langkah yang ditetapkan dalam jadwal konvensi yang mengatur pelaksanaan penangkapan ikan paus di seluruh dunia. Langkah-langkah yang dilakukan oleh IWC antara lain dalam memberikan perlindungan spesies tertentu, menunjuk daerah-daerah tertentu sebagai cagar alam bagi ikan paus, menetapkan batas jumlah dan ukuran ikan paus yang dapat diambil, dan merumuskan dan menentukan musim terbuka dan tertutup dan area untuk penangkapan ikan paus. Penyusunan laporan penangkapan ikan paus dan catatan statistik dan biologi lainnya juga diperlukan untuk membantu keberhasilan IWC dalam memperbaiki regulasi.

IWC juga bekerja untuk mengurangi frekuensi serangan kapal penangkapan paus terhadap ikan paus, dan juga untuk mengkoordinasi kegiatan penguraian dan untuk membangun Conservation Management Plans untuk mengatur masalah populasi dan spesies yang tergolong dalam spesies kunci dan paling langka. Komisi melakukan penelitian yang luas dan juga penelitian pada populasi Cetacea, yang kemudian akan diterbitkan melalui Journal of Cetacean Research dan Manajemen yang merupakan tinjauan jurnal ilmiah resmi dari IWC.

Dengan banyaknya negara yang berpartisipasi untuk menanggulangi isu *whaling*, maka perburuan paus lebih dapat dikontrol terutama pada tingginya aktivitas *whaling* di dunia. Perburuan paus yang terjadi pada abad ke-20 menjadi titik awal merambahnya perburuan paus di dunia, yang hal ini dimulai dari meluasnya jangkauan perburuan paus ke lautan selatan terutama di wilayah Antartika sehingga memberikan tingkat kematian yang signifikan terhadap ikan paus di dunia.

Namun dalam perjalanannya, IWC dianggap mengalami disfungsi karena implementasi tujuan dari IWC untuk melindungi ikan paus dari adanya perburuan secara eksploitatif kurang optimal. Disfungsi organisasi internasional dijelaskan sebagai berjalan atau tidaknya suatu fungsi juga peran dari organisasi internasional dalam perpolitikan dunia. Dengan terjadinya disfungsi organisasi internasional, maka negara akan dengan mudah memanfaatkan peluang dalam wadah

*Implementasi Keanggotaan Jepang Dalam International Whaling  
Commission (IWC) Terkait Kebijakan Scientific Whaling*

tersebut untuk mendapatkan kepercayaan terhadap komitmen atas norma-norma dalam sistem internasional.

Menurut Michael N. Barnett dan Martha Finnemore, disfungsi organisasi internasional dapat terjadi disebabkan oleh dimensi material dalam kondisi internal. Birokrasi politik menjadi bentuk yang pertama pada dimensi material dalam internal organisasi internasional. Birokrasi politik menentukan bagaimana organisasi mendapatkan posisi yang strategis dalam kebijakan pemerintah domestik melalui proses negosiasi antara negara dengan organisasi internasional. Posisi yang strategis tersebut akan memberikan pihak mana yang akan memberikan pengaruh lebih besar terhadap suatu kebijakan. Masih pada dimensi material namun mengarah pada faktor eksternal, organisasi internasional dapat mengalami disfungsi disebabkan oleh dihadapkannya kepada dua pilihan yang harus dipilih oleh organisasi internasional. Kedua pilihan tersebut ialah *bad* dan *awful* karena seringkali dihadapkan pada perbedaan sikap masing-masing negara melalui kebijakan negara yang berlawanan dengan visi dan misi organisasi internasional tersebut.

Dalam dimensi ini, konversi *power* antara negara dengan organisasi internasional dapat menentukan terjadinya disfungsi. Pendekatan *power* yang dapat digunakan dalam kasus ini adalah ketika terdapat adanya negara yang berpandangan realis sehingga negara akan melihat organisasi internasional hanya memiliki peran sebagai perwujudan peran normatif saja. Negara memandang bahwa tidak ada kekuatan yang lebih tinggi daripada negara, terlebih lagi organisasi internasional tidak memiliki kapasitas militer sehingga tidak terdapat adanya *power* untuk menekan negara untuk patuh. Tidak hanya tidak memiliki kapasitas militer, organisasi internasional juga tidak memiliki kapasitas pengenaan pajak dan juga wilayah. Dengan tidak terdapatnya kapasitas tersebut, maka organisasi internasional masih bergantung pada negara dalam pendanaan juga penempatan wilayah sehingga organisasi internasional masih bertumpu pada kekuatan negara. Dengan terjadinya disfungsi, maka negara akan lebih mudah mewujudkan kepentingan-kepentingannya dalam organisasi internasional.

Negara juga mempunyai indikasi untuk melakukan tindakan tidak patuh. Tarik menarik antara kepentingan nasional dengan kepatuhan sering terjadi, sehingga suatu negara dalam waktu tertentu tidak selalu patuh dengan rezim yang diikutinya. Seperti penjelasan di atas, negara memiliki pertimbangan tersendiri dalam melanggar suatu perjanjian yang disebabkan oleh alasan yang didasarkan kepada kalkulasi kepentingan negara. Tingkat kepatuhan negara dalam suatu perjanjian internasional juga menjadi parameter yang dibagi atas tiga preposisi.

Pertama, tingkat kepatuhan negara dalam perjanjian internasional tidak dapat diverifikasi secara empirik. Hal ini menjelaskan bahwa kepatuhan negara sangat tergantung dari tingkat konsistensi sebuah negara, sehingga sikap patuh negara tidak dapat dirumuskan secara empirik. Kedua, permasalahan dalam perjanjian internasional tidak merefleksikan keputusan yang disengaja untuk melanggar berdasarkan kalkulasi dari kepentingan. Pertimbangan negara dalam mentaati maupun melanggar suatu perjanjian pasti disertai oleh alasan tertentu yang didasarkan oleh kalkulasi kepentingan negara. Ketiga, kesesuaian tingkat kepatuhan dengan kepentingan dan tujuan perjanjian menjadi fokus utama sebuah perjanjian internasional, sehingga perjanjian tidak membutuhkan standar kepatuhan yang ketat. Hal tersebut didasari oleh tidak terdapatnya hal yang mengikat para anggota perjanjian dan menjadikan ketepatan tujuan perjanjian menjadi hal utama yang mendorong negara mentaati perjanjian yang telah ditetapkan.

Dalam Te Ohu Kaimoana, IWC dianggap sering mengalami kegagalan ketika proses mencari kesepakatan kompromi antara pihak *pro-whaling* dan *anti-whaling*. Dalam beberapa pertemuan, IWC gagal menengahi keinginan dari kedua belah pihak, dan cenderung berpihak kepada kelompok *pro-whaling*. Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi negara dalam mematuhi perjanjian yang diikutinya adalah kepentingan nasional. Kepentingan suatu negara menjadi refleksi dari upaya negara dalam mengikuti dan bergabung dalam suatu perjanjian, sehingga ketika suatu perjanjian berlawanan dengan arah kepentingan negara, maka negara tidak perlu bergabung dengan perjanjian internasional.

Dalam penerapannya, terkadang negara memutuskan tetap bergabung dengan organisasi internasional yang cenderung memiliki arah yang berlawanan dengan kepentingannya demi perwujudan kepentingan negara. Dengan tergabungnya suatu negara dalam organisasi internasional yang cenderung berlawanan dengan arah kepentingannya, tarik menarik antara kepentingan nasional dengan kepatuhan sering terjadi sehingga suatu negara dalam waktu tertentu tidak selalu patuh dengan rezim yang diikutinya. Negara memiliki pertimbangan tersendiri dalam melanggar suatu perjanjian yang disebabkan oleh alasan yang didasarkan kepada kalkulasi kepentingan negara.

Jepang sudah memulai perburuan ikan paus sejak tahun 1675 dengan mempergunakan metode perburuan menggunakan jaring (*amitorihō*) yang pertamakali ditemukan oleh Wada Kakuemon. Perburuan ikan paus awalnya menjadi suatu bentuk upaya dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi dan mentaati kepercayaannya. Buddha sebagai agama mayoritas di Jepang pada saat itu melarang umatnya untuk mengkonsumsi hewan yang berasal dari daratan, sehingga

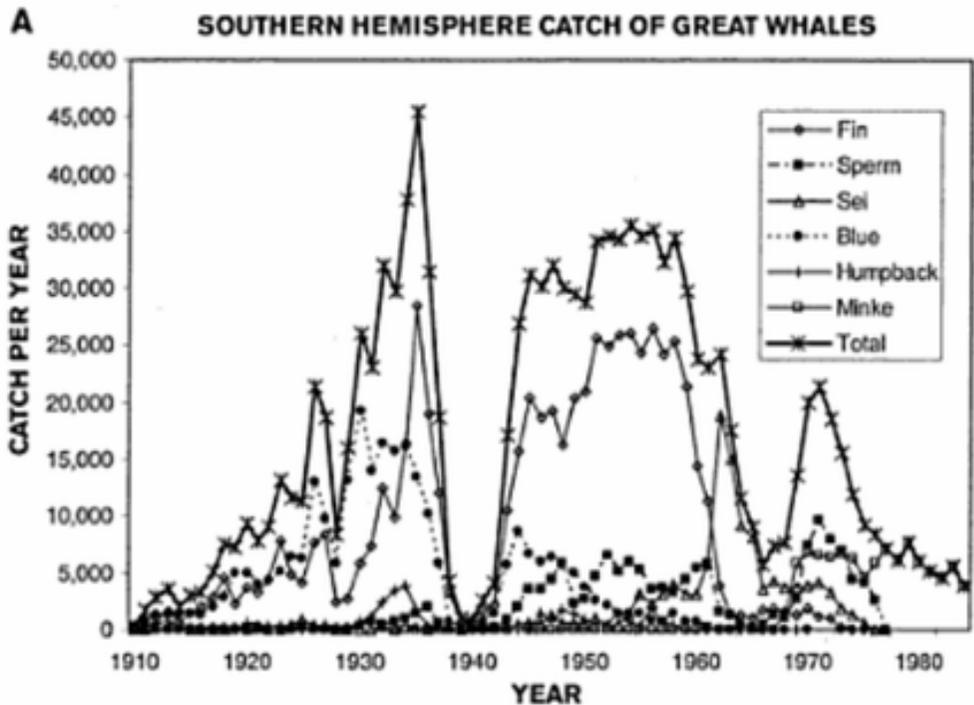
*Implementasi Keanggotaan Jepang Dalam International Whaling  
Commission (IWC) Terkait Kebijakan Scientific Whaling*

sumber daya laut menjadi pilihan utama dalam memenuhi gizi masyarakat Jepang. Metode *amitoriho* menjadi awal perburuan paus dengan skala yang cukup besar, sehingga diperlukan suatu bentuk grup penangkapan ikan paus. Metode ini kemudian menyebar dengan sangat cepat dan berhenti pada tahun 1904 dengan ditemukannya metode berburu terbaru. *Amitoriho* dianggap terlalu sulit dan lambat, sehingga dipergunakannya metode penggunaan tombak sebagai salah satu cara terbaru yang lebih efektif. Masa ini menjadi awal perburuan paus Jepang secara modern, karena dipergunakannya tombak dengan kekuatan pistol sehingga perburuan ikan paus dapat dilakukan secara lebih efisien.

Pada tahun 1947, perburuan ikan paus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Jepang sehingga diatur oleh regulasi pemerintahan Jepang. Tahapan ini menjadi tahapan perburuan ikan paus menjadi suatu komoditi yang memiliki nilai jual sehingga ditetapkan regulasi dalam lisensi, kuota, pembatasan penangkapan, ukuran paus, teknologi, besar kapal, dan jenis spesies yang ditangkap. Industri produk ikan paus mulai terbentuk dan menjadi salah satu industri yang ingin dipertahankan oleh pemerintahan Jepang.

Jepang pertamakali tergabung dalam IWC pada tahun 1951 ketika IWC pada saat itu masih menjadi badan antar-pemerintahan yang berfungsi mengatur dan menjaga harga minyak ikan paus sebagai bagian dari regulasi industri *whaling* yang anggotanya terdiri dari negara-negara pemain dalam industri *whaling*. Seiring berjalannya waktu, IWC mulai merubah arahnya sebagai badan yang fokus terhadap upaya pembatasan perburuan ikan paus yang disebabkan dorongan pihak-pihak *anti-whaling* dan terjadinya penurunan stok ikan paus yang cukup signifikan pada tahun 1960an. Terjadi perburuan paus yang sangat besar antara tahun 1910 sampai dengan 1980, meskipun terjadi penurunan yang cukup drastis pada tahun antara tahun 1970-1980 yang disebabkan perkembangan industri pengelolaan hasil minyak semakin berkembang dan berhasil menciptakan pelumas dengan kualitas tinggi sehingga penggunaan minyak alami paus dapat digantikan. Perburuan paus ini terdiri dari perburuan paus aboriginal, komersial, dan berdasarkan penelitian.

**I.1 Grafik Jumlah Tangkapan Paus Belahan Bumi Selatan Tahun 1910-1980**



Tingginya jumlah paus yang dibunuh memberikan keprihatinan dari berbagai pihak *non-whaling* dan *anti-whaling*, dan menimbulkan upaya dorongan terhadap IWC untuk menyetujui pemberlakuan moratorium. Tepat pada tahun 1982, IWC menyetujui moratorium yang melarang segala bentuk perburuan ikan paus komersial yang mulai aktif pada tahun 1986/1987 sebagai respon tingginya perburuan paus yang terjadi masa itu. Moratorium tersebut tentu menyulitkan Jepang sebagai salah satu negara dengan sejarah komersialisasi paus terbesar hingga saat ini. Pada tahun yang sama, Jepang sempat mengajukan keberatan dengan disetujuinya moratorium yang dianggap menjadi tindakan yang gegabah dari IWC. Meskipun demikian, Jepang akhirnya menarik kembali pengajuan keberatan tersebut yang disebabkan oleh terdapatnya ancaman dari Amerika Serikat dengan menolak akses Jepang ke zona mil 200-nautical ekonomi eksklusif (ZEE) Amerika Serikat. Penolakan tersebut merupakan sanksi dari Amerika Serikat bagi negara yang terbukti tidak menjalankan rezim ICRW secara baik, seperti yang tertera dalam amandemen Pelly 1973 dan amandemen Packwood-Magnuson 1979.

Jepang merasa dihalang-halangi dalam melakukan aktivitasnya untuk melakukan perburuan ikan paus untuk komersialisasi setelah pemberlakuan moratorium pada tahun 1986/1987. Setahun setelah diberlakukannya moratorium, Jepang mengajukan proposal berisi

*Implementasi Keanggotaan Jepang Dalam International Whaling  
Commission (IWC) Terkait Kebijakan Scientific Whaling*

permohonan untuk melakukan *scientific whaling* kepada komisi ilmiah IWC. *Scientific whaling* menjadi satu-satunya cara bagi Jepang agar tetap bisa meneruskan perburuan paus setelah *commercial whaling* tidak diperbolehkan karena moratorium. Jepang melihat terdapat adanya celah dari regulasi yang ditetapkan oleh IWC terkait dilegalkannya perburuan paus dengan kepentingan ilmiah yang tertera dalam artikel IV dan VIII dalam konvensi ICRW.

Perizinan dan penetapan kuota *special permit* untuk melakukan *scientific whaling* ditentukan dari hasil perundingan anggota-anggota dalam IWC. Upaya Jepang dalam mendapatkan *special permit* tersebut ialah dengan mempergunakan *power* yang dimiliki oleh negaranya. Negosiasi yang dilakukan oleh Jepang dilakukan dengan mengarahkan permasalahan perburuan paus kepada tujuan ilmiah dan budaya. Jepang meyakinkan IWC dengan selalu menegaskan bahwa ikan paus mengkonsumsi sangat banyak ikan, hal ini sangat berpengaruh kepada terancamnya mata pencaharian nelayan diseluruh dunia. Negosiasi dalam hal budaya juga menjadi salah satu poin penting bagi Jepang untuk meyakinkan IWC dan masyarakat dunia bahwa *scientific whaling* menjadi salah satu media bagi Jepang untuk melakukan penelitian demi populasi paus dan juga dalam melanjutkan tradisi budaya *whaling* Jepang.

Tradisi budaya Jepang atas perburuan paus menjadi poin penting dalam mengambil hati dari seluruh anggota dalam IWC untuk memberikan toleransi kepada Jepang untuk melakukan *scientific whaling*. Budaya digambarkan sebagai semua aspek non-genetik yang diwariskan antar generasi, yang biasanya merupakan bentuk tulisan seperti buku, bahan, dan semua bentuk keyakinan. Sehingga muncul suatu anggapan bahwa kebudayaan adalah agama, keyakinan, kepercayaan yang menjadi bagian sangat penting karena terhubung dengan perilaku dan bagaimana orang dalam mengambil keputusan.

Budaya diartikan sebagai kegiatan untuk melestarikan tradisi yang sangat tua dan menjaga identitas masyarakat. Identitas masyarakat digambarkan sebagai blok bangunan tertentu dalam budaya yang dibentuk dari waktu ke waktu. Blok bangunan tersebut bukan sebagai bentuk budaya, namun sebagai bentuk ekspresi budaya dari masyarakat yang menjadi bagian dalam blok tersebut. Perburuan paus dengan tujuan ilmiah menjadi jalan untuk Jepang melakukan penelitian-penelitian terhadap ikan paus sehingga Jepang dapat menemukan cara dalam membantu pengembangbiakan ikan paus dan mempertahankan populasinya, agar Jepang dapat tetap mempertahankan tradisinya tanpa berpengaruh kepada kondisi stok paus.

Pandangan terhadap tradisi budaya *whaling* Jepang yang sangat melekat mempermudah Jepang dalam mengelabui dan mendapatkan toleransi dari masyarakat dunia terhadap aktivitas perburuan paus yang dilakukan Jepang. Pembentukan pandangan terhadap tradisi budaya Jepang dalam tradisi *whaling* nyatanya bukan terbentuk begitu saja, melainkan Jepang membentuknya dengan sedemikian rupa melalui implementasi kebijakan-kebijakan domestiknya, sehingga budaya Jepang dapat terbentuk dan menjadi cara untuk mewujudkan tujuan politik Jepang yang sebenarnya. Jepang menjadikan media massa sebagai alat untuk membantu pembentukan opini dengan cara membentuk suatu kerjasama khusus antara media massa dan pemerintah sehingga pemerintah dapat melakukan penyaringan dan pengendalian atas berita yang akan dipublikasikan. Pemerintah Jepang memulai pembentukan opini dari tahapan domestik dengan bantuan media massa dan implementasi kebijakan penyuluhan budaya konsumsi paus ke berbagai institusi dalam negeri. Ketika seluruh masyarakat Jepang sendiri menanamkan budaya mengkonsumsi paus sebagai sejarah hidup negaranya, maka pembentukan opini pada masyarakat dunia juga akan relatif terbentuk.

Konsep negara kepulauan menjadi konsep yang tepat untuk menjelaskan keuntungan yang dimiliki oleh Jepang untuk mempertahankan tradisi dan budaya, dan menyaring berbagai macam bentuk yang masuk dari luar. Berada di sebuah pulau memberikan kemudahan dalam mempertahankan masyarakat asli dan menjaga sesuatu yang dianggap penting dari pengaruh yang tidak diinginkan. Negara kepulauan menjadi semacam bentuk kepulauan psikologi yang dapat menjaga hal-hal dari luar, apakah itu kriminal, imigran ilegal, atau apapun. Sehingga hal tersebut menjadi keuntungan sendiri saat negara menjadikan inisiatif lokal menjadi pertimbangan, sehingga kepercayaan, budaya, dan tradisi yang sangat tua dapat tetap dipertahankan.

Implementasi kebijakan-kebijakan dalam mengkulturisasi politik semakin mudah dilakukan karena Jepang memiliki pemerintahan berbasis Liberal Democratic Party (LDP) yang mayoritas memiliki posisi *pro-whaling*. Sistem yang terbentuk dalam pemerintahan Jepang menyulitkan partai oposisi untuk menggantikan dominasi LDP, sehingga pengarahannya kebijakan-kebijakan domestik terkait *whaling* sulit mendapatkan pengaruh dari pihak eksternal. Dalam penerapan program perburuan ikan paus berdasarkan penelitian, Jepang membagi wilayah penelitian perburuan paus menjadi dua program diantaranya adalah Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic (JARPA) pada tahun 1987/1988-2005, Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Western North Pacific (JARPN) pada 1994-1999. Kontroversi tentang *scientific whaling* baru

*Implementasi Keanggotaan Jepang Dalam International Whaling  
Commission (IWC) Terkait Kebijakan Scientific Whaling*

terjadi setelah diberlakukannya moratorium dan Jepang bersikeras mengajukan *special permit* untuk *scientific whaling*.

Muncul sebuah pertanyaan ketika Jepang tetap bertahan dalam keanggotaan IWC padahal pergerakan Jepang dalam perburuan komersial dihentikan oleh IWC melalui diberlakukannya moratorium. Seharusnya Jepang berusaha keluar dari IWC sebagai gertakan dari Jepang atas keberatannya terhadap moratorium, namun Jepang tidak melakukannya dan tetap bertahan. Islandia menjadi salah satu contoh negara yang pernah keluar dari keanggotaan IWC pada tahun 1992. Islandia keluar dari IWC disebabkan pada tahun 1991 Islandia merasa IWC telah meninggalkan semua pemanfaatan yang bias dilakukan kepada paus karena Islandia gagal merealisasikan permintaannya kepada IWC untuk mengambil 92 ekor paus jenis Fin dan 158 ekor paus jenis Minke. Selain Islandia, Norwegia dan Belanda juga pernah keluar dari IWC pada tahun 1956 karena tidak setuju dengan penetapan Blue Whale Unit (BWU) pada angka 14.500 paus/musim, meskipun Norwegia bergabung kembali dalam IWC pada tahun 1960. Banyak Negara yang keluar dari keanggotaan IWC disebabkan tidak sejalan dengan visi dan juga misi IWC selain Islandia, Norwegia, dan juga Belanda. Jamaika, Dominika, Kepulauan Solomon, dan sebagainya menjadi beberapa contoh Negara yang keluar dari keanggotaan IWC.

**Tabel 1.1 Keanggotaan International Whaling Commission, 1972-92**

<b>Tahun</b>	<b>Negara keluar dari keanggotaan IWC</b>
1980-1	Panama
1981-2	Kanada
1982-3	Jamaika, Dominika
1986-92	Kepulauan Solomon, Mauritius, Belize, Mesir, Filipina, Uruguay, Islandia
1994	Seychelles

Seperti yang telah dijelaskan diatas, kepentingan suatu negara menjadi refleksi dari upaya negara dalam mengikuti dan tergabung dalam suatu perjanjian, sehingga ketika suatu perjanjian berlawanan dengan arah kepentingan negara, maka negara tidak perlu bergabung dan bertahan dalam perjanjian internasional. Kemudian apa yang menjadi alasan Jepang tetap bertahan dalam keanggotaan IWC? Padahal IWC menyetujui moratorium yang jelas-jelas berlawanan dengan kepentingan Jepang.

Penelitian ini dimulai dengan menggunakan *power* dalam organisasi internasional milik Samuel Barkin yang menjelaskan menurut perspektif

internasionalis bahwa terdapat sejumlah sumber dari kekuasaan negara dan sejumlah cara dimana *power* negara tertentu dapat dinyatakan berpengaruh dalam penciptaan dan pengelolaan organisasi internasional. *Power* disini diartikan sebagai negosiasi dalam penetapan agenda dan penciptaan birokrasi kelembagaan juga prosedur. Namun dalam penelitian ini hanya digunakan negosiasi dalam penetapan agenda, tanpa mempergunakan negosiasi dalam penciptaan kelembagaan dan prosedur. Sumber *power* yang mempengaruhi adanya ketergantungan asimetris organisasi internasional pada negara tertentu ialah berdasarkan struktural kekuasaan dan juga ideologi.

Negosiasi dapat diartikan sebagai penggunaan *power* secara langsung dari negara dalam mengatur organisasi internasional. Negosiasi tersebut dapat diterapkan dalam kemampuan negara untuk mengatur agenda. Kekuatan negosiasi akan terlihat ketika negara dapat mendapatkan jalan dalam sebuah masalah yang muncul dalam sebuah diskusi. Kemampuan dalam mengatur agenda dapat dilihat ketika negara dapat mengatur negosiasi agenda ke tempat pertama atau ketika negara dapat mengarahkan kepada apa yang harus dibicarakan dan apa yang tidak.

Selanjutnya adalah kekuatan untuk membentuk cara berpikir orang dalam melihat suatu permasalahan. Sehingga ketika suatu negara memiliki kekuatan dalam hal tertentu, maka negara tersebut dapat mengarahkan cara berpikir orang lain dalam melihat suatu permasalahan ke arah yang akan menguntungkan bagi negara tersebut. Cara terakhir bagi negara untuk mempergunakan *power*-nya ialah melalui penciptaan birokrasi internasional dan prosedur, yang dapat disebut juga sebagai kekuatan institusional. Hal ini merupakan kemampuan dari negara tertentu untuk mempengaruhi struktur birokrasi ke arah yang diinginkan.

Sumber *power* negara dapat dilihat dari ketergantungan asimetris yang terjadi dalam organisasi internasional. Kebutuhan negara menjadi salah satu contoh dalam memperlihatkan sumber *power* negara, seperti halnya ketika salah satu negara mempunyai kebutuhan dan kepentingan yang lebih sedikit daripada negara lain, maka negara tersebut memiliki kekuatan yang relatif lebih besar dalam menciptakan juga mengelola hal tersebut. Ini terjadi karena negara yang mempunyai kepentingan yang lebih sedikit akan lebih tidak memiliki ketergantungan, berbeda dengan negara yang mempunyai kepentingan yang besar sehingga sangat bergantung. Contohnya ialah seperti negara yang membutuhkan persetujuan lebih, sehingga akan mengurangi kekuatan negosiasi dari negara tersebut. Namun ketergantungan asimetris dapat dilihat secara berbeda tergantung kasusnya seperti dalam permasalahan lingkungan. Negara yang tercemar oleh polusi negara lain membutuhkan salah satu negara penghasil polusi terbesar agar bergabung dalam organisasi internasional untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun

*Implementasi Keanggotaan Jepang Dalam International Whaling  
Commission (IWC) Terkait Kebijakan Scientific Whaling*

dalam kasus ini, negara penghasil polusi terbesar akan memiliki kekuatan dalam bernegosiasi karena terdapat adanya ketergantungan dari negara penerima polusi untuk menunggu solusi yang akan mereka hasilkan. Ketergantungan asimetris juga dapat terjadi antara negara dengan organisasi internasional yang dapat dilihat berdasarkan ketergantungan dari salah satu pihak.

Selanjutnya penelitian ini menghubungkan dengan konsep Japanese System milik Karel van Wolferen yang menjelaskan struktur politik Jepang dengan menggunakan model "Japanese System". Sistem disini tidak merujuk kepada penjelasan sekumpulan organ yang terletak di dalam struktur politik dengan tujuan tertentu, melainkan untuk melihatkan secara jelas perbedaan Jepang dengan negara lainnya dengan pemerintahan yang dikuasai oleh kelompok kepentingan khusus yang pandangannya tidak dapat dirubah disebabkan adanya perselisihan antar departemen. Jepang memiliki struktur politik tidak berbentuk yang didalamnya terjadi hal kompleks tentang tumpang tindih hirarki, tanpa adanya bagian yang paling tinggi. Oleh karena itu, tidak ada lembaga tertinggi dengan yurisdiksi tertinggi atas yang lain di Jepang.

Kelompok kepentingan khusus ini mempunyai tujuan untuk mengatur kekuatan mereka sehingga dapat mengatur sistem. Kelompok ini terdiri dari birokrasi, klik-klik politik, kelompok industrialis, dan pers. Terdapat beberapa strategi yang dijelaskan oleh van Wolferen untuk menjelaskan sistem jepang, yakni menggunakan manajemen realitas, kulturisasi politik, dan depolitisasi politik.

Konsep Manajemen Realitas juga turut dipergunakan dalam penelitian ini dimana di antara berbagai perangkat untuk mengelola representasi realitas, salah satu yang kuat dan relevan ialah media massa. Untuk mewujudkan sistem yang diinginkan oleh kelompok kepentingan khusus, sistem harus mengatasi masalah kurangnya dasar hukum dan akuntabilitas publik Jepang. Media massa berpotensi untuk mengatasi masalah ini, sehingga dibentuk suatu kelompok reporter media massa pada masa Perang Dunia II sebagai lembaga untuk membentuk hubungan saling menguntungkan antara media dengan sistem. Setiap kementerian dan instansi pemerintah tergabung dalam kelompok reporter media massa, sehingga mereka dapat mengontrol dan mengklasifikasi distribusi informasi.

Dengan adanya hubungan ini, para wartawan juga akan terbantu dengan terus adanya koordinasi media dari pemegang kekuasaan sehingga wartawan tidak akan kehilangan perkembangan penting yang sedang terjadi. Ketika media massa mendapatkan informasi yang aktual dari

para birokrat, maka media massa bisa mendapatkan otoritas dalam masyarakat Jepang. Suara tunggal yang dibangun dari adanya kontrol sensor distribusi pemberitaan menjadi sumber utama dari kekuasaan pers Jepang, meskipun pada saat ini media Jepang semakin independen dan memaparkan berita mereka tentang isu perburuan ikan paus.

Realitas dikelola oleh pers dan para aktor politik utama dalam sebuah sistem dengan mempergunakan budaya sebagai strategi utama. Budaya dibenarkan sebagai salah satu strategi utama yang telah disebarakan secara domestik maupun internasional, karena pembenaran atas budaya merupakan hal yang sulit untuk dikritik. Budaya menjadi suatu bentuk alasan sistematis untuk melakukan eksploitasi, seperti melakukan pelanggaran, pemerasan, dan segala bentuk pelaksanaan kekuatan yang tidak terkontrol.

Depolitisasi politik menjadi strategi yang bertujuan untuk mengatur pandangan bahwa pembuatan kebijakan Jepang merupakan hasil dari pentahbisan. Dengan adanya depolitisasi, maka Jepang membentuk pandangan yang tidak tertarik kekuasaan dengan kepura-puraannya. Alat untuk mewujudkan strategi ini adalah dengan membentuk dewan musyawarah yang dapat menjadi simbol pembenaran atas kebijakan mereka dalam niat menutupi niat politik yang sebenarnya.

Konsep yang dapat menegaskan konsep-konsep sebelumnya adalah konsep struktur paternalis milik Shohei Yonemoto yang menjelaskan terdapat adanya ideologi politik yang mendasar di Jepang yakni terdapat adanya model hubungan paternalistik antara pejabat pemerintah dengan aktor-aktor non-pemerintah lainnya, kementerian keuangan dengan lembaga pemerintah lainnya yang terstruktur dalam politik Jepang. Yonemoto menunjukkan di Jepang, legislatif yang berupa anggota diet dan eksekutif administrasi yang merupakan kabinet juga lembaga pemerintah lainnya bersatu untuk membentuk hubungan yang saling melengkapi. Hubungan ini nyatanya sudah terjadi sejak tahun 1800-an dan berlangsung sampai dengan saat ini, namun hubungan ini tidak dapat dijelaskan jika tidak melihat adanya aktivitas terselubung dari operasi kekuasaan antara legislatif dan birokrat yang terdapat di Jepang.

Aktivitas kebijakan substansial yang paling utama di Jepang adalah untuk benar-benar memfokuskan pada eksekutif administratif. Birokrat mempunyai kendali yang besar terhadap merancang kebijakan, sehingga legislator hanya bergantung oleh rancangan birokrat yang didalamnya terdapat proses lobi untuk membuat perubahan-perubahan yang menguntungkan di dalam undang-undang. Hal tersebut sudah menjadi mitos kesempurnaan eksekutif administratif. Didalamnya terdiri dan disusun orang-orang yang terbaik dan tercerdas di eksekutif

*Implementasi Keanggotaan Jepang Dalam International Whaling  
Commission (IWC) Terkait Kebijakan Scientific Whaling*

administrasi secara paternalis, sehingga dapat membuat kebijakan yang efektif tanpa kesalahan dengan merakit dan menganalisis informasi dari kualitas tertinggi.

Tidak terdapat adanya transparansi dalam proses pembuatan kebijakan, karena pada dasarnya hasil dari kebijakan tersebut merupakan bentuk penggabungan tuntutan yang disampaikan oleh para legislator dan kelompok-kelompok lobi di balik aktivitas tertutup dan menjadi usulan legislatif kemudian diimplementasikan. Begitu juga dengan hasil dari kebijakan yang tidak memiliki bagian tanggung jawab yang jelas, sebagian besar kebijakan Jepang hanya menguraikan unsur utama dari kebijakan tersebut dan meninggalkan ruang besar untuk kekuasaan diskresi kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memutuskan rincian implementasi kebijakan. Struktur kebijakan ini merupakan refleksi dari ideologi paternalisme, dimana kekuasaan diskresi harus diserahkan kepada instansi pemerintah karena hal tersebut dipercaya sebagai yang terbaik bagi warga Jepang. Terbukti implementasi struktur ini menghasilkan biaya pembuatan kebijakan yang lebih efektif, sehingga hal ini menjadi salah satu kunci Jepang dalam membangun kembali perekonomian Jepang pada saat kejatuhan Jepang paska Perang Dunia II.

Kementerian keuangan dan juga lembaga pemerintah lainnya juga terkait dalam hubungan paternalistik. Pelaku diantaranya adalah pelindung paternalistik yang mendalami dan mengevaluasi usulan anggaran yang akan diajukan. Hal ini tidak dapat terjadi tanpa melihat bahwa biro anggaran adalah organisasi yang paling luas untuk memutuskan urusan anggaran, dan makin menjelaskan terjadinya mitos kesempurnaan yang terjadi di Jepang. Ketika anggaran mendapatkan persetujuan, pengusul menerapkan pelayanan administrasi atas nama pemerintah. Ini membuat pengusul organisasi korporasi didedikasikan untuk terus memperbesar anggaran dan juga yurisdiksinya.

Disini Yonemoto juga setuju dengan pendapat van Wolveren bahwa media massa memainkan peranan sangat penting dalam perpolitikan Jepang, yakni dengan mengelola realitas. Hubungan mutualisme antara media massa dengan instansi pemerintah menunjukkan terdapatnya ketergantungan dari media massa dalam penerimaan informasi oleh instansi pemerintah yang dianggap penting. Disini terjadi pemahaman bersama dari media massa bahwa lembaga pemerintah memiliki informasi penting yang menguntungkan.

Di Jepang, media massa memiliki kemampuan yang besar dalam mempengaruhi agenda kebijakan. Sehingga birokrat berusaha memanfaatkan keuntungan dari kemampuan media massa dalam

mempengaruhi agenda kebijakan melalui sistem kerjasama antara media massa dengan pemerintah. Melalui sistem ini, mereka dengan leluasa dapat mengatur agenda kebijakan dan waktu kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan. Yonemoto juga memiliki pandangan yang sama dengan van Wolveren tentang bagaimana hubungan mutualisme yang terjadi dalam sistem ini dapat menghasilkan insentif dalam mempertahankan hubungan simbiosis berbentuk lembaga antara birokrat dengan media massa.

Dari uraian di atas, sintesis teori penulis adalah Jepang mempergunakan *power*-nya dengan baik melalui upaya negosiasi yang mengarahkan kepada pemahaman budaya dan penelitian. Jepang meyakini bahwa karena semua keputusan yang etnosentris membuat budaya menjadi salah satu jalan yang sulit untuk dipersalahkan. Penelitian juga menjadi bentuk alasan rasionalitas yang dapat mendukung alasan budaya. Model Japanese system menjadi strategi Jepang untuk membentuk pandangan budaya, yakni dengan melakukan manajemen realitas, kulturalisasi politik, dan depolitisasi politik. *Structural paternalistic model* yang dianut oleh Jepang semakin mempermudah Jepang dalam mewujudkan *model Japanese system* karena terdapatnya hubungan yang erat antara semua pihak sehingga upaya manipulasi jauh lebih mudah dilakukan.

Dari pembahasan yang telah dijelaskan penulis, penulis menyimpulkan bahwa Jepang berhasil memanfaatkan *power*-nya yang berupa negosiasi untuk mendapatkan *special permit* yang tertera dalam artikel VIII konvensi untuk melakukan *scientific whaling* dengan menggunakan konsep-konsep yang telah penulis paparkan sebelumnya. Negosiasi yang dilakukan Jepang ialah seperti dengan menekankan pada penelitian terhadap tingkat konsumsi ikan oleh ikan paus yang sejak diberlakukannya moratorium yang menyebabkan bidang perikanan di Jepang mengalami penurunan sebanyak enam juta ton per tahun, berbanding terbalik dengan pertumbuhan ikan paus yang meningkat 4% per tahun. Jepang mengarahkan pandangan pihak-pihak lain dalam memandang permasalahan tersebut kearah mengatasi permasalahan konsumsi ikan oleh ikan paus tersebut dengan melakukan *scientific whaling*. Argumen yang diutarakan oleh Jepang tersebut dijadikan sebagai membentuk pandangan rasionalitas bagi negara berkembang untuk ikut bergabung dalam blok pemilihan suara milik Jepang di IWC. Penelitian nyatanya menjadi alasan rasional untuk membentuk arah berpikir pihak-pihak lain, terlebih dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh Jepang semakin mendukung kekuatan Jepang dalam meyakinkan pernyataannya melalui sisi penelitian.

Budaya juga menjadi salah satu cara Jepang untuk meyakinkan IWC dan masyarakat dunia bahwa *scientific whaling* yang akan dilakukan oleh

*Implementasi Keanggotaan Jepang Dalam International Whaling  
Commission (IWC) Terkait Kebijakan Scientific Whaling*

Jepang selain berdasarkan alasan penelitian, namun juga berdasarkan alasan pemenuhan perwujudan budaya *whaling* oleh Jepang yang sudah terjadi dalam waktu yang sangat lama. Relativitas budaya dipergunakan oleh Jepang sebagai perwujudan kepentingan, karena budaya berbeda disetiap wilayahnya sehingga tidak terdapat adanya pembenaran secara mutlak terhadap budaya tersebut. Toleransi menjadi solusi dari relativitas budaya, dan budaya merupakan hal yang sangat sulit untuk dipersalahkan dan dihakimi. Hal ini yang dimanfaatkan Jepang sebagai upaya agar dapat tetap melanjutkan perburuan paus.

Tujuan Jepang dalam mendapatkan *special permit* untuk dapat melanjutkan *scientific whaling* merupakan refleksi dari terdapatnya kepentingan kelompok khusus di Jepang yaitu *whaling triangle*. *Whaling triangle* merupakan hubungan tertutup antara FAJ, ICR, dan *Kyodo Senpaku* yang memiliki kepentingan bahwa Jepang harus tetap melanjutkan kegiatan *whaling*. Dengan tetap berlangsungnya kebijakan *whaling* Jepang, maka perputaran uang yang terjadi dalam hubungan tertutup *whaling triangle* akan terus terjadi sehingga dapat menguntungkan kelompok kepentingan khusus tersebut secara finansial. Strategi yang dilakukan oleh *whaling triangle* untuk melanjutkan terus *whaling* melalui *special permit* ialah dengan melakukan manajemen realitas, kulturalisasi politik, dan depolitisasi politik. Manajemen realitas dilakukan oleh *whaling triangle* dengan membentuk *Kisha-Kurabu* sebagai kelompok media massa dalam mengelola realitas dengan cara-cara yang menguntungkan Jepang. *Kisha-kurabu* juga menjadi bagian yang membantu dalam melakukan kulturalisasi politik, yaitu dengan mengendalikan sekelompok pemimpin opini untuk mempromosikan perburuan ikan paus dan grup ini memiliki peran penting dalam menyebarkan diskursus budaya. Grup ini disebut dengan *Hogeï Mondai Kondankai*. Strategi yang terakhir dilakukan melalui FAJ dengan melakukan diskursus ditengah-tengah garis legalitas dan penelitian, yang berguna untuk menciptakan suatu diskursus yang terlihat “didepolitisasi.” Dengan bantuan *whaling triangle* dan *kisha-kurabu* sebagai pengelola realitas, mereka melakukan strategi membangun pemikiran budaya konsumsi paus cara nasional dan menggambarkan negara *anti-whaling* sebagai bentuk imperialis budaya, kemudian mendepolitisasi posisi mereka dengan menkulturisasi isu tersebut.

Proses yang dibentuk oleh birokrasi, politisi, industri, dan media tersebut dapat berjalan dengan baik karena terdapat adanya *structural paternalistic model* dalam sistem Jepang. Ideologi politik yang mendasar dalam perpolitikan Jepang ini menjadikan hubungan yang harmonis dan saling melengkapi antara pejabat pemerintah dengan aktor-aktor non-pemerintah lainnya, kementerian keuangan dengan

lembaga pemerintah lainnya yang terstruktur dalam politik Jepang sehingga mempermudah dalam melakukan kebijakan politik terselubung. Sistem didalam Jepang yang terbukti susah untuk dirubah dapat dibuktikan dengan dominasi partai dalam pemerintahan Jepang dari tahun 1950an hingga saat ini memperlihatkan Jepang terlihat sangat berbeda bila dibandingkan dengan lainnya. Keunikan yang dimiliki dalam sistem Jepang diyakini menjadi alasan berhasilnya Jepang dalam membentuk alasan budaya dan penelitian sebagai cara untuk mewujudkan kepentingannya.

Disini penulis menyimpulkan bahwa alasan budaya dan penelitian menjadi cara paling utama dalam membuktikan keberhasilan Jepang dalam memaksimalkan keanggotaannya untuk mendapatkan *special permit* untuk melakukan *scientific whaling* sebagai perwujudan kepentingan *whaling triangle*. Berfungsinya alasan budaya dan penelitian dalam strategi Jepang mendapatkan *special permit* membuktikan bahwa hipotesis penulis telah terbukti benar.

Penulis menyadari bahwa keterbatasan penelitian ini adalah terbatasnya data yang berasal dari pemerintahan Jepang dalam menjelaskan tujuan sebenarnya dibalik upaya *scientific whaling* sebagai data pendukung penulis. Sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat bagaimana terdapat tujuan untuk memenuhi kepentingan *whaling triangle* untuk tetap melanjutkan perburuan paus dibalik *special permit* yang didapatkan Jepang sebagai izin untuk melakukan *scientific whaling*. Selain itu penelitian terkait keberhasilan Jepang dalam memanfaatkan keanggotaannya untuk mendapatkan *special permit* ini dapat disempurnakan bila dihadirkan data pembanding yang berasal dari negara-negara lainnya seperti misalnya di Norwegia.

## Daftar Pustaka

### JURNAL ONLINE

- Kagawa-Fox, Midori, dalam Chris Burgess, 2009. "Japan's Whaling Obsession" <http://www.japantimes.co.jp/community/2010/08/17/general/ap-peals-to-culture-tradition-ignore-the-historical-facts/>, diakses pada Selasa, 25 Juni 2014.
- N. Michael, Barnett dan Finnemore, Martha. "The Politics, Power and Pathologies of International Organization" (1999). hal. 717. [http://home.gwu.edu/~finnemor/articles/1999\\_ios\\_io.pdf](http://home.gwu.edu/~finnemor/articles/1999_ios_io.pdf) diakses pada Rabu, 21 Mei 2014 pukul 18.44.

## **TESIS DAN DISERTASI**

- Anonim. "Future bleak for International Whaling Commission." (Te Ohu Kaimoana, 28 Juni, 2010).
- Hansemark, Niclas. "Japanese Nationalism : A Foreign View" (Master Thesis, Department of Political Science, Lund University, December 2007).
- Puti Aisyah, Miranti. "Motivasi Jepang Mengeluarkan Kebijakan Second Phase of the Japanese Whale Research Program Under Special Permit In The Antartics (JARPA II)." 2005, Skripsi Departemen Ilmu Hubungan Internasional.
- Schneider, Christian. "The Role of Dysfunctional International Organizations in World Politics: The Case of the United Nations Office on Drugs and Crime." (Zurich: University of Zurich Press, 2012).
- Toledo, Gustavo dan Langguth, Alfredo. "Data on Biology and Exploitation of West Atlantic Sperm Whales, *Physeter Macrocephalus* off the coast of Paraiba, Brazil." (December 2009), diakses pada Rabu, 21 Mei 2014 pukul 15.49.

## **JURNAL**

- Chelliah, John dan D'Netto, Brian. "Japanese Whaling Strategies" (December 2008).
- Gerry J. Nagtzaam, "The International Whaling Commission and the Elusive Great Whale of Preservationism" 33 *Wm. & Mary Env'tl. L. & Pol'y Rev.* 375 (2009).
- Greenpeace. "Whaling on Trial: Japan's Whale Meat Scandal and the Trial of the Tokyo Two" (2010).
- Hirata, Keiko. "Why Japan Supports Whaling" Center for the Study of Democracy: University of California (2003), hal. 34-35.
- Ishii, Atsushi and Okubo, Ayako. "An Alternative Explanation of Japan's Whaling Diplomacy in the Post-Moratorium Era" *Journal of International Wildlife Law and Policy*, 10;55-87, 2007.
- Komatsu, Masayuki dan Misaki, Shigeko. "The Truth Behind the Whaling Dispute" (2001).
- R. DeSombre, Elizabeth. "Whaling and Whale Conservation" dalam *The Global Environment and World Politics 2nd Edition.* (Continuum, 2007).
- Takahashi, Junichi et.al. "Japanese Whaling Culture: Continuities and Diversities" (1989).

## **BUKU**

- Barkin, J. Samuel. *International Organizations: Theories and Institution*, (New York: Palgrave Macmillan, 2006).
- Chayes, Abram dan Chayes, Antonia Handler. On Compliance. dalam *International Organization*, Vol. 47, No. 2 (Spring, 1993).

- D. Krasner, Stephen. Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. dalam International Organization, (NY: Cornell University Press, 1983)
- Gellner, Ernest. Relativism and Social Science (New York: Cambridge University Press, 1985), <http://www.class.uh.edu/faculty/tsommers/moral%20diversity/cultural%20relativism%20abuse%20of%20individual.pdf>, diakses pada 7 Juli 2014 pukul 00.36.
- Morgenthau, Hans J.. Another 'Great Debate': The National Interest of the United States. dalam Harold Karan Jacobson (ed.), America Foreign Policy (New York: Random House, 1965).hal. 119
- Rusidi (1991) dalam Prof. Dr. Suryana, M.Si. Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010).

#### SUMBER INTERNET LAINNYA

- Assets Panda. "Total Whales Killed." [assets.panda.org?downloads/iwc61\\_whales\\_killed\\_final.pdf](http://assets.panda.org/downloads/iwc61_whales_killed_final.pdf), diakses pada 6 Juli 2014 pukul 18.16.
- Countrystudies. "The Liberal Democratic Party." <http://countrystudies.us/japan/122.htm>, diakses pada 4 juni pukul 05.22.
- Consulate-General of Japan, Sydney. "The Japanese Government's Position on Whaling". [http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/english/top/important\\_info/japanese\\_governments\\_position.html](http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/english/top/important_info/japanese_governments_position.html), diakses pada Rabu, 21 mei 2014 pukul 16.17.
- International Convention For the Regulation of Whaling. <http://www.iwcoffice.org/commission/convention.htm>, diakses pada Selasa, 15 Januari 2013 pukul 21.35.
- International Whaling Commission. History and Purpose. <http://iwc.int/history-and-purpose>, diakses pada Selasa, 15 Januari 2013 pukul 21.41.
- International Whaling Commission. "Scientific Special Permit." <http://iwc.int/permits>, diakses pada Selasa, 1 Juni pukul 16.02
- IFAW. "In The Name of Scientific Whaling?." <http://www.ifaw.org/sites/default/files/In%20the%20Name%20of%20Science%20A%20Review%20of%20Scientific%20Whaling.pdf>, diakses pada Selasa, 1 Juni pukul 19.38.
- International Whaling Commission. "Iceland and Commercial Whaling." <http://iwc.int/iceland>, diakses pada Selasa, 15 Januari 2013 pukul 21.40.

*Implementasi Keanggotaan Jepang Dalam International Whaling  
Commission (IWC) Terkait Kebijakan Scientific Whaling*

- Institute of Cetacean Research . “Scientific Contribution.”  
<http://www.icrwhale.org/scJARPA.html>, diakses pada 6 Maret 2014  
pukul 13.04.
- Institute of Cetacean Research. “Why Whale Research.”  
<http://www.icrwhale.org/04-B-jen.pdf>, diakses pada 5 Maret 2014  
pukul 20.43.
- IFAW. “The Economics of Japanese Whaling: A Collapsing Industry  
Burdens Taxpayers.”  
<http://www.ifaw.org/sites/default/files/economics-of-japanese-whaling-japan-ifaw.pdf>, hal. 7, diakses pada Selasa, 1 Juni pukul 19.38.
- Jjmccullough. “Post-war Prime Minister of Japan.”  
<http://www.jjmccullough.com/japan.htm>, diakses pada 4 Juni  
pukul 19.01.
- The Institute of Cetacean Research. “The Responsibility for Research”.  
<http://www.icrwhale.org/responsibility.html>, diakses pada  
Selasa, 1 Juni pukul 16.02.
- Ushistory. “Japan: An Island Nation.”  
<http://www.ushistory.org/civ/10.asp> diakses pada Selasa, 1 Juni  
pukul 19.23.